

**Akibat Hukum  
TERHADAP ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

*Perspektif dalam Hukum Islam  
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan*



Dr. Paisol Burlian, A.Ag. M.Hum.

**Akibat Hukum  
TERHADAP ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN  
BEDA AGAMA**

*Perspektif dalam Hukum Islam  
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan*



Penerbit

**SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1033

---

**AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN  
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF DALAM  
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

---

Oleh:

**Dr. Paisol Burlian, A.Ag. M.Hum.**

Diterbitkan oleh Sinar Grafika  
Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun  
Jakarta Timur 13220  
info@bumiaksara.co.id  
www.bumiaksara.co.id



---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan pertama, Agustus 2014  
Perancang kulit, Eni Suharti  
Layouter, Roslaeni  
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-583-2

---

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**Paisol Burlian**

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif dalam hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan/ oleh Paisol Burlian; editor, Tarmizi. -- Cet. 1. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

xiv + 115 hlm.; 20,5 cm

ISBN 978-979-007-583-2

1. Akibat Hukum--Perkawinan.

I. Judul.

II. Tarmizi.

**Motto:**

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya”*

Hasil Penelitian ini ku persembahkan kepada:

- a. Keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang;
- b. Keluarga besar Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang;
- c. Istri tercinta dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan dan doanya, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini;
- d. Almamaterku dan sahabat-sahabatku, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



# ***Kata Pengantar***

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk hasil penelitian ini dengan judul **“Akibat Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Perspektif dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”** sebagai salah satu syarat untuk mengusul pangkat/jenjang akademik guru besar (Profesor) pada Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa akibat hukum bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu tidak timbulnya hubungan antara suami istri karena perkawinan yang tidak sah, anak tidak bisa mewarisi harta benda dari ayahnya, kemudian tidak ada hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua (ayah) hanya mempunyai hubungan keperdataan terhadap ibunya dan keluarganya ibunya.

Dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berdampak pada psikologis anak karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama akan bingung untuk memeluk agama ayah atau ibunya, kemudian dampak hukumnya baik hukum Islam maupun hukum negara Indonesia karena kedua hukum ini tidak ada yang mengesahkan perkawinan beda agama begitu juga anak yang dilahirkan merupakan anak yang tidak sah. Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa selama proses penulisan hasil penelitian ini maupun isinya masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A. selaku Rektor IAIN Raden Fatah Palembang;
2. Dr. Kusnadi, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang;
3. Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Istri tercinta dan anak-anakku yang telah memotivasi dan do'a;

Akhirnya penulis berharap kiranya hasil penelitian ini walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan masih dapat menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya hukum perkawinan pada umumnya, serta berguna untuk orang-orang yang membacanya.

Palembang, Juni 2014

Penulis

DR. PAISOL BURLIAN, S.AG, M.HUM



# Abstrak

Hukum keluarga mengatur masalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan yang seiman atau seagama, sehingga dapat menjadi keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, dan berwawasan nusantara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: *Pertama*; apa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? *Kedua*, bagaimana

dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu tidak timbulnya hubungan antara suami istri karena perkawinan yang tidak sah, anak tidak bisa mewarisi harta benda dari ayahnya, kemudian tidak ada hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua (ayah). Sedangkan dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berdampak pada psikologis anak karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama akan bingung untuk memeluk agama ayah atau ibunya, kemudian dampak hukumnya baik hukum Islam maupun hukum negara Indonesia karena kedua hukum ini tidak ada yang mengesahkan perkawinan beda agama begitu juga anak yang dilahirkan merupakan anak yang tidak sah.

**Kata kunci:** *Akibat Hukum, Anak, Perkawinan, Beda Agama.*

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Ruang Lingkup .....	17
D. Tujuan dan Kegunaan .....	17
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	32
B. Tujuan Perkawinan.....	36
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	43
D. Hak-Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	50
E. Pendapat Para Ahli tentang Perlindungan Anak dari Per- kawinan Beda Agama.....	52

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	56
B. Dampak Negatif Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	77
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>114</b>

# ***Daftar Tabel***

Tabel 1.1	Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan oleh Selebriti Indonesia .....	13
Tabel 1.2	Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama.....	14



# ***Bab I***

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama Islam, yang disebut syariat Islam, tidak hanya memuat hukum-hukum shalat, zakat, puasa, melainkan juga mengandung hukum-hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankan secara sempurna. Misalnya penyelenggara hukum perkawinan<sup>1</sup>.

---

1 Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Hukum keluarga mengatur masalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketenteraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketenteraman, dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi, dan berwawasan nusantara<sup>2</sup>.

Bangsa Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk memiliki peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional, dalam arti berlaku untuk seluruh golongan masyarakat bangsa Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Keinginan unifikasi peraturan perkawinan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia secara menyeluruh.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teori “resepsi” seperti yang diajarkan di zaman Hindia Belanda menjadi hapus dengan sendirinya. Teori resepsi menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam apabila sesuatu hukum Islam telah

---

2 Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2002, hlm. 1.



nyata-nyata diresepsi oleh dan dalam hukum adat, maka dengan melihat pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak ada keragu-raguan untuk menerima dalil bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan/perantara hukum adat<sup>3</sup>.

Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama masing-masing pemeluknya<sup>4</sup>. Oleh karena itu, pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan di kantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum<sup>5</sup>.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan

---

3 Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

4 Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975, hlm. 56.

5 Wila Chandrawita Supriadi, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia, Jakarta, 1997, hlm. 98.

rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya<sup>6</sup>.

Menurut Hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah<sup>7</sup>. Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, damai, cinta, dan kasih sayang)<sup>8</sup>.

Di dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai *aqad*, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim<sup>9</sup>. Sedangkan ditinjau dari sudut hukum adat, Ter Haar memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan

6 Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

7 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm.11.

8 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

9 Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004, hlm 19.

adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya, tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat<sup>10</sup>.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan<sup>11</sup>.

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dalam pernikahan atau rumah tangga terdapat kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Anjuran ini ditujukan baik kepada orang tua atau wali maupun anjuran langsung kepada para pemuda yang sudah mempunyai kemampuan dan keinginan<sup>12</sup>. Dasar perkawinan itu diperintahkan/dianjurkan oleh syariat Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat (3) yang artinya sebagai berikut:

*“Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua tiga dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”.*

---

10 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

11 *Ibid*, hlm. 8.

12 Labib MZ dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006, hlm. 462.

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ra ia berkata: “bahwasanya Nabi Muhammad SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau bersabda: *“Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan-perempuan, barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah ia dari golonganku”*”.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni; a) *rub'al-ibadat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan antara manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan, d) *Rub'al-al Jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya<sup>13</sup>.

Zakiah Darajat, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat hidup manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpah kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>13</sup> Timahi dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 15.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang<sup>14</sup>.

Karena nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lainnya. Sehingga menjadi pertalian perkawinan yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan<sup>15</sup>.

Dalam mencapai hal tersebut di atas, maka di dalam memilih istri harus memiliki sifat iman kepada Allah SWT yaitu memenuhi hati dengan cahaya dan keyakinan. Iman nya menjadi pokok ketaatan dan kepatuhan pada perintah Allah SWT, mendorong amal perbuatan dan hati yang diridhai, tenang, konsisten, tanpa ada rasa riya dan

---

14 Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, Depag RI, Jakarta, 1985, hlm. 64.

15 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011, hlm. 374

tidak menampakkan ketaatan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istri dengan ketenangan hati dan berhubungan dengan keindahan dan kebahagiaan<sup>16</sup>. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 menjelaskan perkawinan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan perkawinan yang berbeda agama tidak sah.

Mengenai larangan perkawinan berbeda agama, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mengambil pelajaran”.*

Dan firman-Nya yang lain dalam surat An-Nisa ayat 141 yang artinya, sebagai berikut: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (musyrik) untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.* Jadi jelas, bahwa wanita muslimah sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki musyrik. Begitu pula, seorang musyrik tidak boleh memiliki budak muslim<sup>17</sup>.

---

16 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 40.

17 Labib MZ dan Harniawati, *op, cit*, hlm. 473.

Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jika terdapat calon mempelai yang berbeda agama, menginginkan melangsungkan perkawinan sementara mereka tetap bertahan pada agamanya masing-masing. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, di Indonesia terdapat suatu yang berlaku, yang memberikan jalan keluar dari kesulitan ini, yaitu peraturan tentang perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) termuat dalam stb 1. 1989 Nomor 158<sup>18</sup>. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka peraturan Perkawinan Campuran stb 1. 1989 Nomor 158 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila seorang suami atau istri *murtad* sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah karena *fasakh* menurut pendapat mayoritas ulama. Dituturkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena *fasakh* sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa serta merta terjadi perpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya *iddah*. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum *iddah* berakhir maka suami istri tetap dalam hubungan pernikahan<sup>19</sup>.

Meskipun perkawinan antarpemeluk agama tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

18 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 65.

19 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 162.

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, atau perkawinan campuran<sup>20</sup>. Sehingga ada langkah pembaharuan yang cukup berani yang ditempuh oleh kompilasi mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam ke dalam Bab larangan perkawinan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dilarang melangsungkan perkawinan antar seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain,
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain,
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan pasal ini apabila pernikahan itu terjadi maka pernikahannya dibatalkan. Bagi pihak yang beriktikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga bagi pihak lainnya. Jadi pihak yang beriktikad baik hanya menerima keuntungannya saja dari harta kekayaan dalam perkawinannya, dan jika ada rugi ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bagi yang beriktikad buruk akibatnya adalah sebaliknya. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah, jadi anak-anak

---

20 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 273.



itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu)<sup>21</sup>.

Kemudian mengenai anak yang dihasilkan dari perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata hanya menjelaskan anak dari dua sudut yaitu anak yang sah (anak yang lahir dari perkawinan yang dicatat) dan anak yang tidak sah (anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat). Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak.

Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perbedaan pokok seperti ini membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah *inferieur* (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi<sup>22</sup>.

---

21 Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 121.

22 J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya). Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip pendapat Koentjaraningrat:

“Suatu keluarga berfungsi sebagai kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan dari sesamanya serta keamanan hidup dan kelompok di mana individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.<sup>23</sup>”

Begitu juga anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama secara sosial harus memiliki hak-hak untuk berinteraksi atau hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia<sup>24</sup>.

Perkawinan beda agama ini banyak dilakukan oleh pasangan selebriti Indonesia. Beberapa di antaranya meresmikan hubungan mereka di luar negeri, dan beberapa yang lain menjalani prosesi pernikahan sesuai agama salah satu dari mereka. Maka dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

---

23 *Ibid*, hlm. 23.

24 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1987, hlm. 51.

**Tabel 1.1** Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan oleh Selebriti Indonesia

No.	Nama Pasangan Selebriti yang Melakukan Perkawinan Beda Agama
1.	<b>Irfan Bachdim</b> yang beragama Islam menikah dengan <b>Jennifer Kurniawan</b> yang non Islam. Pernikahan mereka memang tidak digelar di Indonesia. Mereka memilih mengukuhkan cinta mereka di Negeri Kincir, Belanda, karena di sana memungkinkan adanya pernikahan beda keyakinan.
2.	<b>Audrey</b> yang non Islam menikah dengan <b>Aqi Alexa</b> yang beragama Islam. Pelaksanaan pernikahannya dengan balutan pernikahan Islam yang digelar pada tanggal 1 Februari 2012.
3.	<b>Katon Bagaskara</b> yang beragama Katolik menikah dengan <b>Ira Wibowo</b> yang beragama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1996. pernikahannya dengan Ira dikaruniai dua anak, Andhika Radya Bagaskara, dan Mario Arya Bagaskara. Hingga kini, 16 tahun sudah mereka lalui hidup bersama.
4.	<b>Adrie Subono</b> yang beragama Islam menikah dengan <b>Chrisye</b> yang beragama Kristen. Dalam keluarga dengan tiga orang anak itu, Adrie menerapkan prinsip demokrasi. Ia membebaskan anak-anaknya untuk memilih sendiri agama mereka. Anak-anak mereka memilih agamanya masing-masing, dan kebetulan sesuai dengan jenis kelamin orangtua. Dua putrinya ikut agama ibu, dan putranya masuk Islam bersama Adrie.
5.	<b>Ari Sihasale</b> yang beragama Kristen menikah dengan <b>Nia Zulkarnaen</b> yang beragama Islam. Pada 25 September 2003 di Perth Australia.
6.	<b>Jeremy Thomas</b> yang beragama Kristen, menikah dengan <b>Ina Indayanti</b> yang beragama Islam. Mereka menikah dengan masih menganut agama masing-masing. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Axel Matthew Thomas dan Valerie Teresa Thomas.
7.	<b>Deddy Corbuzier</b> yang seorang Tionghoa beragama Katolik menikah dengan <b>Kalina</b> yang beragama Islam yang digelar pada tanggal 24 Februari 2004 <sup>25</sup> .

25 <http://www.lihat.co.id/2013/03/10-pasangan-selebritis-ini-bahagia.html>, diakses tanggal 2 Juni 2014.

Dari tabel di atas, dapat dilihat dampak negatif pada anak Adrie Subono dan Chrisye anak-anaknya dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis, agama, dan yuridis pada anak-anaknya sehingga mempunyai dampak negatif secara sosial. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

**Tabel 1.2** Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

No.	Aspek-Aspek yang Akan Timbul	Pemasalahan yang Akan Timbul
1	Aspek psikologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memudarnya kehidupan rumah tangga.</li> <li>b. Tujuan berumah tangga tidak tercapai, karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.</li> <li>c. Perkawinan mempertemukan dua keluarga besar, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami-istri, melainkan juga keluarga besarnya. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama telah memiliki anak.</li> <li>d. Berebut pengaruh, dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anak-anaknya<sup>26</sup>.</li> </ul>
2	Aspek agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak sah.</li> <li>b. Pandangan agama Katolik, salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah.</li> </ul>

berlanjut

26 Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2011, hlm. 54–83.

**Tabel 1.2** Lanjutan

No.	Aspek-Aspek yang Akan Timbul	Pemasalahan yang Akan Timbul
		<p>c. Pandangan agama Protestan, pada prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman.</p> <p>d. Pandangan agama Hindu, perkawinan orang yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu.</p> <p>e. Pandangan agama Buddha, perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Buddha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Buddha<sup>27</sup>.</p>
3	Aspek yuridis	Aspek yuridis, hukum perkawinan beda agama di Indonesia adalah tidak sah <sup>28</sup> .

Kalau anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut dapat melakukan interaksi sosialnya berjalan dengan baik, maka ia dapat hidup tenteram di dalam masyarakat karena dapat berkomunikasi melalui interaksi maupun dengan kerja sama di dalam masyarakat<sup>29</sup>. Sehingga anak tersebut tidak merasa hina

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 17.

bahwa ia dilahirkan dari perkawinan yang beda agama yang jelas-jelas perkawinan yang dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum negara yang mengatur tentang perkawinan.

Meskipun di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan antar pemeluk agama atau pernikahan beda agama. Tetapi perkawinan beda agama ini masih terjadi di negara Indonesia terutama dilakukan oleh selebritis-selebritis, bahkan perkawinannya melahirkan anak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut. Kemudian dapat memberikan pencerahan kepada para pembaca yang kebenaran melakukan perkawinan beda agama.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Perspektif dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji dampak atau akibat hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama. Karena sekarang ini perkawinan beda agama masih terjadi di negara Republik Indonesia meskipun di dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat tegas melarangnya. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji hak-hak anak terutama hak-hak keperdataannya kepada kedua orang tuanya yang berbeda agama.

## D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif hukum Islam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Berguna untuk mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia, sehingga dapat memberikan tawaran untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta bagi peneliti pada khususnya mengenai bagi orang melakukan perkawinan beda agama yang terjadi sekarang ini dan permasalahannya serta solusinya.
2. Secara Praktis
- a. Merupakan bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dan atau pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah perkawinan di Indonesia.
  - b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan.
  - c. Sebagai dasar dan landasan guna penelitian yang lebih lanjut.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, sebelum membahas teori perlindungan hukum penulis terlebih dahulu menjelaskan apa teori hukum itu? Bruggink menjelaskan bahwa teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting didepositifkan<sup>30</sup>. Tugas dari teori hukum menurut Radbruch adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam<sup>31</sup>.

---

30 Bruggink dalam Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 53.

31 Radbruch dalam Kuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.



Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum<sup>32</sup>. Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh F. H. Van Der Burg menjelaskan bahwa: “untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindak tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu<sup>33</sup>”.

Sedangkan pengertian hukum perlindungan anak menurut para ahli hukum seperti Bismar Siregar adalah aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang<sup>34</sup>.

Ruang lingkup perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
  1. Bidang hukum publik;
  2. Bidang hukum keperdataan.

---

32 Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 140.

33 F. H. Van Der Burg, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 267.

34 Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 15.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:

1. Bidang sosial;
2. Bidang kesehatan; dan
3. Bidang pendidikan.

Jadi, perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat<sup>35</sup>.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut<sup>36</sup>.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat<sup>37</sup>.

---

35 *Ibid*, hlm. 13.

36 Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 28.

37 Irma Setyowati Soemitro, *op, cit*, hlm. 13.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa. Sesuai dengan konvensi tentang Hak Anak yang telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya<sup>38</sup>.

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama atau perkawinan yang dibatalkan karena murtad sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, istri maupun terhadap anak-anak mereka, asal perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan iktikad baik. Jika iktikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka Pasal 96 KUH Perdata menentukan bahwa pihak yang berlaku dengan iktikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anak dari perkawinannya, dan seseorang dianggap beriktikad baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk suatu perkawinan.

Negara dan lingkungan yang mengarahkan anak-anak dalam masa-masa awal perkembangan mereka, tidak dimaksudkan kecuali untuk memberikan apa yang tidak diberikan oleh keluarga,

---

38 Amir Martosedono, *Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1994, hlm. 27.

atau untuk mencegah kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan menjalankan fungsi keluarga. Namun, sulit dipastikan bahwa ketika lembaga-lembaga ini diharapkan untuk menggantikan fungsi keluarga, dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang seperti yang diberikan oleh orang tuanya atau rumah<sup>39</sup>.

Begitu juga, anak memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum baik terhadap segala bentuk penyalahgunaan, penyalahgunaan, dan perbuatan-perbuatan diskriminasi. Konvensi tentang hak-hak anak telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia telah terikat melaksanakan Konvensi tersebut<sup>40</sup>.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang

---

39 Nurfuadi, *Urgensi Keluarga dalam Mendidik Anak*, dalam Jurnal Studi Gender & Anak Yin Yang Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Volume 4, Nomor 1 Januari-Juni 2009, hlm. 9.

40 Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1991, hlm. 154.

perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam<sup>41</sup>”.

### **b. Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang wanita yang beragama Islam melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam.

### **c. Perlindungan Hak Anak**

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak<sup>42</sup>.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara<sup>43</sup>.

---

41 Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 1.

42 Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.13.

43 Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 36.

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak<sup>44</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maksudnya penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Menurut Jonny Ibrahim, dalam bukunya *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, mengatakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif”<sup>45</sup>.

Pendapat di atas, memperkuat pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya *Penelitian Hukum*, yang menjelaskan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter

---

44 *Loc, cit*, hlm. 36.

45 Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi<sup>46</sup>.

## **2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya *Hukum dan Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa “Dalam penelitian normatif, bahan yang diperlukan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>47</sup>”.

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

---

46 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

47 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum terhadap Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini<sup>48</sup>.

---

48 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.



### **3. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini (Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

### **4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis atau pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi<sup>49</sup>.

Analisis bahan-bahan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan hukum perkawinan, yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain:

---

49 *Ibid*, hlm. 53.

1. Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut Penafsiran Gramatikal. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan<sup>50</sup>. Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan<sup>51</sup>.
2. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi. “Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri”.<sup>52</sup>

---

50 Utrecht, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 9.

51 Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *ibid*, hlm. 10.

52 *Ibid*, hlm. 11.

Selanjutnya dilakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) yang bersifat praktis-fungsional, dengan cara penguraian teleologis-konstruktif, sehingga ditemukan konsep hukum terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir *deduktif*, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret (persoalan hukum faktual yang konkret) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi (perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan dan Kegunaan
- E. Kerangka Teoretis dan Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perkawinan
  - 1. Menurut Para Ahli;
  - 2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 3. Menurut KUH Perdata;
  - 4. Menurut Kompilasi Hukum Islam;
  - 5. Menurut Hukum Adat.
- B. Tujuan Perkawinan
- C. Bentuk-Bentuk Perkawinan
- D. Perlindungan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama
- E. Perlindungan Hak-Hak Anak

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 1. Keberadaan Hukum Islam di Indonesia;
  - 2. Transformasi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Perdata;
  - 3. Akibat Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam;

4. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- B. Dampak Negatif Bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  1. Hukum Pernikahan Beda Agama;
  2. Dampak Perkawinan Beda Agama;
  3. Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama;
  4. Dampak Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam;
  5. Dampak Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    - a. Peran Anak dalam Keluarga dan Bangsa;
    - b. Dampak Negatif bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama.

#### **BAB IV: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **Bab II**

## **Tinjauan Pustaka**

### **A. Pengertian Perkawinan**

#### **1. Menurut Para Ahli**

- a. R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>1</sup>.
- b. K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri<sup>2</sup>.
- c. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan<sup>3</sup>.
- d. Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan

---

1 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan xi, Sinar Grafika, Jakarta, 1987 hlm. 23.

2 K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 27.

3 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, tanpa tahun, hlm. 9.

keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing<sup>4</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau *zawaj* atau *tazwiz* mempunyai arti “kawin atau perkawinan”.

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya<sup>5</sup>.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi: *Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

---

4 Muhammad Abu Ishrah dalam H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina utama, Semarang, 1993, hlm. 3–4.

5 Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966, hlm. 562.

*keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), di mana pengertian sahnya suatu perkawinan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayat (2) nya yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekadar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia<sup>6</sup>.

### **3. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidan* antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga untuk menaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut dibanding dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Mulyadi, tidaklah ada perbedaan yang prinsipil<sup>7</sup>.

6 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 9.

7 Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1994, hlm. 13.



#### **4. Menurut KUH Perdata**

Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perkawinan terdapat dalam Pasal 26, yaitu bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Demikian dapat diambil sebagai suatu pengertian bahwa perkawinan menurut KUH Perdata adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk waktu yang lama atau hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, hubungan tersebut terdaftar atau tercatat dan diakui oleh negara. Maksud dari Pasal 26 KUH Perdata, yaitu bahwa undang-undang tidak ikut campur terhadap upacara keagamaan, undang-undang hanya mengenal yang disebut perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat sipil, hal tersebut tercantum dalam Pasal 81 KUH Perdata.

#### **5. Menurut Hukum Adat**

Sedangkan menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja merupakan perikatan adat, tetapi juga perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda. Meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, perkawinan ini tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan tersangkut di dalamnya<sup>8</sup>.

---

8 Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, (Beginnelsen en stelsel Van Het Adatrecht)*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm. 59.

## B. Tujuan Perkawinan

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangankan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal<sup>9</sup>.

Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir<sup>10</sup>”.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.

9 Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 15.

10 *Alquran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 644.

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang, dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam.

Jelas bahwa di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*<sup>11</sup>.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan<sup>12</sup>.

11 Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 78.

12 M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975, hlm. 20.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya;
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui pernikahan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala;
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali pernikahan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya<sup>13</sup>;

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurnya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan;
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum

---

13 Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990, hlm. 37-38

hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai-kata tertarik pada seseorang wanita selain istrinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu istrinya sendiri. Kalaupun dinikahinya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat;

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga

apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga<sup>14</sup>. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.”<sup>15</sup>

Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman yang artinya:

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.”<sup>16</sup>

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan

---

14 *Ibid*, hlm. 40–41.

15 Alquran dan Terjemahannya, *op. cit*, hlm 847.

16 *Ibid*, hlm. 114.

antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu, perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

- a. Alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW<sup>17</sup>.

Dengan demikian, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan memengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

---

17 Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 7.



## C. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Dalam sejarah hukum Islam tercatat beberapa bentuk perkawinan yang ada pada zaman jahiliyah hingga lahirnya Islam yang telah dihapus oleh syariat (hukum Islam). Bentuk-bentuk perkawinan tidak saja terdapat di kalangan masyarakat Arab tetapi juga terdapat pada masyarakat atau bangsa lain di dunia ini.

Bentuk-bentuk perkawinan itu ialah sebagai berikut.

1. Perkawinan *istibdla* atau kawin dagang, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan di mana setelah mereka menjadi suami istri, si suami memperdagangkan istrinya untuk berkencan, berhubungan seksual dengan laki-laki lain yang sudah pesan kepada suami itu, tentu saja dalam masalah ini si suami mendapatkan imbalan dari laki-laki yang berkencan dengan istri itu dan istri merupakan korban bisnis seks dari suaminya<sup>18</sup>.
2. Perkawinan *isytirak*, *isytirak* artinya bersekutu atau kongsi yaitu perkawinan antara beberapa orang pria secara bersekutu, dengan seorang wanita dan mereka memberikan hak kepada wanita itu untuk menyerahkan anak yang telah dilahirkan kepada siapa saja diantara pria yang disukainya yang telah ber-setubuh dengannya. Perkawinan *sifah*, *sifah* artinya pelacuran (*prostitution*), perzinahan. Nikah *sifah* keadaan hampir tidak beda dengan nikah *isytirak* hanya saja jumlah percumbuan lebih banyak dan laki-lakinya lebih banyak lagi.
3. Perkawinan *magt*. *Magt* artinya kemurkaan atau kebencian. Nikah *magt* artinya seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita bekas istri bapaknya.

---

18 Al Hamidy dan Hmd Ali, *Islam dan Perkawinan*, Al Maarif, Bandung, 1983, hlm. 31.

4. Nikah *jamak*, *jamak* artinya himpun, kumpul atau campur. Nikah jamak maksudnya seorang pria nikah sekaligus dengan dua orang wanita yang bersaudara yakni dengan kakak dan adiknya.
5. Nikah *mut'ah*, *mut'ah* artinya kesedapan, bersenang-senang atau bekal yang sedikit atau benda yang dipergunakan dengan senang hati. Nikah *mut'ah* berarti nikah bersenang-senang dan bersedap-sedapan untuk sementara waktu, sesudah cukup waktunya lalu bercerai.
6. Nikah *badal* atau *mubaadalah*, *badal* berarti ganti atau tukar, Mubaadalah artinya pertukaran atau bergantian. Nikah *badal* atau mubaadalah artinya dua orang pria kawin dengan dua orang wanita, tiap seorang dari keduanya boleh tukar-menukar istri dengan istri kawannya, kapan saja suami sukai, istri tadi harus menurut<sup>19</sup>.
7. Nikah atau perkawinan *syghaar*. *Syghaar* artinya membuang atau meniadakan, sebab nikah itu tidak ada mas kawin. Nikah *syghaar* maksudnya seorang pria menikahkan anak putrinya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan seorang pria, dengan syarat pria ini mau mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan pria pertama atau tidak pakai mas kawin<sup>20</sup>.
8. Perkawinan atau nikah *muhallil*, *muhallil* adalah perkawinan antara seorang janda yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya

---

19 *Ibid*, hlm. 48.

20 Bibit Suprpto, *op. cit*, hlm. 53.

dengan seorang laki-laki oleh suaminya dengan seorang laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu akan menceraikan perempuan (istri itu) setelah digaulinya, agar dapat dinikahi kembali oleh suami pertama.

9. Perkawinan *ittikhadzul akhdan*, *ittikhadzul akhdan* artinya mengambil gundik-gundik orang-orang Arab jahiliyah biasa, mengambil gundik-gundik secara sembunyi atau gelap-gelapan karena malu secara terang-terangan<sup>21</sup>.

Sehubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan yang telah diuraikan di atas, maka dapat juga dikaji lagi beberapa bentuk lainnya yaitu:

1. Bentuk perkawinan menurut perkembangannya
  - a. *Promes quiteit* (*promesquity*), yaitu percampuran laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak teratur dan dapat dikatakan seperti yang terdapat pada alam binatang.
  - b. Perkawinan gerombolan (*grouphuvelijk*), yaitu perkawinan antara segerombolan orang laki-laki dengan segerombolan orang perempuan sebagai perkembangan dari *promes quiteit*.
  - c. Perkawinan *matrilineal*, yaitu perkawinan yang menimbulkan bentuk garis keturunan perempuan atau perkawinan dari mana anak yang dilahirkannya termasuk garis keturunan ibunya (dan ibunya) seperti terjadi dalam masyarakat Minangkabau.
  - d. Perkawinan *patrilineal* sebagai lawan perkawinan *matrilineal*, dimana anak-anak yang dilahirkannya termasuk dari keturunan bapaknya (*gens bapaknya*), seperti terjadi

---

21 *Ibid*, hlm. 56.

pada masyarakat Batak, Arab dan masyarakat lainnya yang memiliki marga berdasarkan keturunan kebakapan.

- e. Perkawinan *parental* yaitu perkawinan di mana anak yang dilahirkannya merupakan anak kedua orang tuanya dalam penetapan garis keturunannya, berarti di sini berlaku garis keturunan dari kedua orang tuanya (*parental-bilateral*). Seperti pada masyarakat Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain yang tidak mengenal marga<sup>22</sup>.
2. Bentuk perkawinan menurut lingkungannya
    - a. Perkawinan *endogami*, yaitu perkawinan yang terjadi dalam satu lingkungan, maksudnya suami dan istri berasal dari satu desa atau satu keturunan yang sama.
    - b. Perkawinan *eksogami*, yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari lingkungan atau desa lain atau kawin dengan orang di luar desa atau lingkungan keluarganya.
    - c. *Eleutherogami*, yaitu perkawinan yang bebas untuk ke dalam maupun keluar lingkungan atau desanya, laki-laki bebas untuk mencari istri mengambil gadis atau janda dari desanya sendiri atau desa lain, kota lain ataupun daerah lain, dia bebas untuk mengambil istri dari lingkungan sendiri, keluarga sedarah sendiri maupun orang lain. Sistem inilah yang paling disenangi oleh masyarakat sekarang terutama dari kalangan pemuda.
  3. Perkawinan menurut jumlah pengantin
    - a. Perkawinan *monogami* (*mono* = satu, *gamein* = kawin), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang

22 Suharto Riyoatmojo, *Antropologi Budaya*, UP. Prapanca, Yogyakarta, 1980, hlm. 50.

- istri hanya memiliki seorang suami sampai salah seorang atau keduanya meninggal dunia ataupun kemungkinan bercerai.
- b. Perkawinan *poligami* (*poly* = banyak, *gamein* = kawin), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan<sup>23</sup>.
  4. Perkawinan menurut proses terjadinya
    - a. Perkawinan dengan *peminangan* (*aanzoekhuwelijk*) merupakan perkawinan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, perkawinan ini didahului dengan peminangan atau lamaran dari salah satu pihak, kemudian diteruskan dengan pertunangan dan perkawinan. Lamaran biasanya ditandai dengan pemberian tanda disebut *peningset* (Jawa), pengancang (Sunda), tanda *kongnarit* (Aceh), dan sebagainya.
    - b. Perkawinan *lari* (*wegioophuwelijk*), disebut juga perkawinan rangkap, yaitu perkawinan dengan cara membawa lari wanita yang akan dikawini, baik dilakukan dengan sukarela atas persetujuan dengan mereka berdua ataupun dibawa lari secara paksa. Perkawinan ini sering terjadi di Lampung, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, dan Dayak<sup>24</sup>.
    - c. Kawin *mengganti* (*levirathuwelijk*) disebut juga *pareakhon* (Batak), ganti tikar atau kawin *enggau* (Palembang-Bengkulu), nyemalong (Lampung), *medun ranjang* (Jawa) kebanyakan terjadi pada masyarakat patrilineal yang ada sistem pembayaran uang pembelian (jujur) dari pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin wanita. Dalam perkawinan mengganti ini pembayaran uang jujur tidak diperlukan lagi. Perkawinan

---

23 Bibit Suprpto, *op. cit.*, hlm. 58–61.

24 Suharto Riyoatmojo, *op. cit.*, hlm. 55.

- mengganti atau (*levirathuweljik*) adalah perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan saudara laki-laki almarhum suaminya (saudara iparnya)<sup>25</sup>.
- d. Kawin *meneruskan* (*sororathuweljik*) atau *continuation merried* merupakan kebalikan dari perkawinan mengganti. Perkawinan ini sering terjadi pada masyarakat matrilineal juga pada masyarakat parental. Perkawinan meneruskan adalah perkawinan antara seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya dengan saudara iparnya (kakak atau adik perempuan almarhumah istrinya), yang seakan-akan istri kedua meneruskan fungsi dan kedudukan istri pertama yang tidak lain saudara perempuannya sendiri<sup>26</sup>.
- e. Perkawinan *menginjam jago* (*inlijkhuweljik*) yang terjadi pada masyarakat patrilineal seperti Batak. Terjadinya perkawinan ini apabila keluarga pengantin wanita tidak mempunyai anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga itu. Maka diadakan *menginjam jago*, artinya *pinjam jago*, yaitu perkawinan dengan perjanjian apabila nanti pasangan pengantin itu melahirkan anak laki-laki akan dimasukkan marga ibunya, tidak seperti biasanya masuk marga ayahnya. Dalam perkawinan ini karena keluarga wanita memang membutuhkan anak laki-laki, maka dilaksanakan tanpa menggunakan uang jujur.
- f. Perkawinan *ambil anak* (*adoptie merried*) disebut juga *angkap* (gayo), *semendo ambil anak*, *nangkun*, *cambur sumbai* (Sumatra Selatan), *kawin ambil piara* (Ambon), *nyeburin* (Bali).

---

25 *Ibid*, hlm. 57.

26 *Ibid*, hlm. 60.

- g. Kawin *mengabdikan* atau *kawin karya* (*suitor service, dienhuwelijk*), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena dia tidak dapat (tidak kuat) membayar uang jujur, maka ia harus bekerja atau mengabdikan terlebih dahulu kepada keluarga calon mertuanya untuk waktu yang ditentukan sebagai ganti uang jujur. Perkawinan sering terjadi pada masyarakat parilineal. Istilah lainnya di daerah-daerah adalah *ering beli, ngisik* (Lampung), *madinding* (Batak), *nunggonin* (Bali).
- h. Kawin *kanak-kanak* (*perkawinan anak, kinder huwelijk*), yaitu perkawinan antara jejaka kecil dengan gadis kecil yang sebenarnya masih belum waktunya untuk menikah. Perkawinan ini sering disebut dengan kawin gantung atau gantung kawin, sering terdapat di daerah-daerah pedalaman pada masa lalu seperti sering terjadi pada suku Madura, tetapi kini dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan penyuluhan hukum dan keluarga, maka perkawinan kanak-kanak semakin berkurang<sup>27</sup>.

Demikianlah bentuk-bentuk perkawinan yang pernah terjadi pada berbagai masyarakat, tentu saja di antara perkawinan itu ada yang sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam ada pula yang tidak sesuai dan dilarang. Hakikat perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang suami dengan seorang istri untuk hidup berkeluarga sebagai suami istri yang sah dan melahirkan keturunan yang sah sebagai penerus generasinya serta untuk membentuk keluarga yang selamat dan bahagia dari dunia sampai akhirat.

---

27 Bibit Suprpto, *op. cit.*, hlm. 66.

## D. Hak-Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

Seorang anak yang sah berada sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, di bawah kekuasaan orang tua, selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, maka kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya diputuskan<sup>28</sup>. Baik putusnya perkawinan akibat cerai maupun akibat salah satu orang tuanya murtad.

Begitu juga setiap anak yang dihasilkan dari perkawinan baik perkawinan yang sah maupun perkawinan yang dilakukan dengan beda agama, karena sekarang ini perkawinan beda agama ini masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ayahnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayahnya mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupan<sup>29</sup>.

Apabila anak perempuan yang dihasilkan dari perkawinan beda agama, maka hak-haknya dibebankan kepada ayahnya untuk

28 Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 48.

29 Slamet Abidin dan H. Amibuddin, *Fiqh Munakhat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 176.



memberikan nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah<sup>30</sup>.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak membawa akibat hukum seperti akibat hukum anak angkat, karena anak angkat melahirkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan seperti itu hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan di antara mereka ada hubungan waris mewarisi. Orang tua angkat di kemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya<sup>31</sup>.

Mengenai kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Imam Malik menjelaskan bahwa orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Alquran dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya<sup>32</sup>.

---

30 Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, hlm. 170.

31 Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 81.

32 Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, hlm. 171.

## **E. Pendapat Para Ahli tentang Perlindungan Anak dari Perkawinan Beda Agama**

Menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan<sup>33</sup>.

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional. Di dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah

---

33 Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin<sup>34</sup>.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda. Di mana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi Perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut<sup>35</sup>.

Sedangkan tentang pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan-batasan sebagai berikut: Arif Gosita mengatakan: “bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya<sup>36</sup>”.

---

34 Irma Setyowati Soemitro, *op. cit*, hlm. 14.

35 Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 62.

36 Irma Setyowati Soemitro, *op. cit*, hlm. 15.

Sedangkan menurut Bismar Siregar menyebutkan: “aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban<sup>37</sup>”.

Kemudian, J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberikan pengertian Hukum Perlindungan Anak dalam 2 (dua) pengertian masing-masing pengertian luas dan sempit.

- a. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang;
- b. Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:
  - Ketentuan hukum perdata;
  - Ketentuan hukum pidana;
  - Ketentuan hukum acara<sup>38</sup>.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak kita juga harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

- a. Nondiskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apa pun juga;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 14.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Di mana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya: penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

## ***Bab III***

# **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Akibat Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

#### **1. Keberadaan Hukum Islam di Indonesia**

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam (lebih kurang 85% dari jumlah penduduk). Namun demikian, di bidang hukum sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum *Eropa Continental (civil law system)*, sistem hukum *Anglo Saxon (common law system)*, dan sebagian kecil hukum adat dan hukum Islam<sup>1</sup>.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Alquran, hadis, dan pendapat para ulama' (fikih). Hukum Islam merupakan

---

<sup>1</sup> Sapipto Raharjo mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum *Eropa Continental* dengan alasan Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda sehingga hukum yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Lihat Sapipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 235.

hukum yang senyatanya hidup, berlaku dan berkembang di masyarakat (*the living law*) sebagaimana hukum adat untuk sebagian masyarakat di Indonesia. Sebagaimana hukum adat, hukum Islam sudah seharusnya menjadi sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional<sup>2</sup>, karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan, dengan kata lain hukum yang berlaku dalam suatu negara merupakan *resultante* suatu masyarakat<sup>3</sup>.

Hukum Islam hanya dapat berlaku secara nasional apabila di-formalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan diberlakukannya sebuah undang-undang maka ada pemaksaan dari negara untuk menjalankan hukum yang telah dibuatnya. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana formalisasi hukum adat dan hukum Barat dalam hukum nasional, melalui formalisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, paling tidak nilai-nilai hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sekarang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar geneologisnya dapat ditarik jauh ke belakang, yaitu saat pertama kali Islam masuk ke nusantara. Jadi, hukum Islam masuk ke wilayah Indonesia bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Indonesia<sup>4</sup>. Sejak

---

2 Yusril Ihza Mahendra, "*Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Desember 2007, hlm. 7.

3 Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 114.

4 Azyumazri Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 24 dan 36.

kedatangannya, ia merupakan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral<sup>5</sup>.

Meskipun sekarang sudah ada upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum Islam yang terjadi dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang;
- b. Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek;
- c. Pengaruh reformasi di berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi acuan dalam hukum nasional;
- d. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam, baik oleh pakar hukum Islam manca negara maupun pakar hukum Islam nasional, terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu gender<sup>6</sup>.

Hukum perdata yang berlaku sekarang ini di Indonesia, tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa, dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain<sup>7</sup>. Akibat pengaruh hukum perdata

---

5 Ahmad Azhar Basyir, *Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Mimbar Hukum No, 13, Th, IV 1994, hlm. 29.

6 Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 154.

7 Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, IAIN Press, Medan, 2000, hlm. 69.



Eropa kontinental inilah sehingga perkawinan beda agama masih sering terjadi terutama di Indonesia, karena menganggap perkawinan beda agama bukanlah suatu yang memalukan atau aib oleh yang melakukan perkawinan beda agama. Kemudian mereka menganggap bahwa anak yang dilahirkannya sama seperti anak yang lahir perkawinan yang seagama. Pandangan inilah jangan disamakan dengan hukum perkawinan yang diatur di dalam hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam sangat tegas melarang perkawinan beda agama yang dilakukan oleh umatnya (umat Islam).

Sejalan dengan muara Islam yang bertujuan menjadi rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di alam, maka tujuan syariat mendatang *mashlahat* (kebaikan) dan mencegah *mafsadat* (keburukan). Itulah yang harus dikejar, baik yang sudah bersifat *dhahir* (jelas) maupun yang masih bersifat *sirr* (tersembunyi) dan baik yang sudah terukur maupun yang belum terukur<sup>8</sup>.

Oleh karena itu, Abdul Ghani Abdullah menyatakan bahwa ada tiga sebab hukum Islam telah mendapat tempat konstitusional. *Pertama*, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. *Kedua*, alasan sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran hukum Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. *Ketiga*, alasan yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara

---

8 Abu Ishaq Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usu Asy-Syariah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz I, 2005, hlm. 196.

Republik Indonesia tahun 1945, memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal<sup>9</sup>.

Meskipun dalam konteks asas personalitas ke-Islaman, maka hukum perdata Islam di Indonesia cakupan berlakunya, hanya mengikat hubungan hukum perdata di antara orang-orang yang beragama Islam, dan tidak berlaku bagi warga negara yang tidak beragama Islam. Dari sisi peristiwa hukumnya, terdapat perkembangan, tidak hanya dalam sosial hubungan perorangan di dalam keluarga saja, akan tetapi juga berlaku dalam sosial muamalah keseharian, seperti; pinjam-meminjam, utang-piutang, sewa-menyewa, berusaha bersama dengan berserikat (*mudharabah/musyarakah*), kemudian diatur dalam hukum lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun nonperbankan<sup>10</sup>.

## **2. Transformasi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Perdata**

Hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal, dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Namun bagaimanakah pemberlakuan hukum Islam itu? Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang peribadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya bagaimana hukum Islam mengatur tentang tata cara menjalankan salat lima waktu, berpuasa,

---

9 Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No. 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Mimbar Hukum al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994, hlm. 94–106.

10 Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 9.

Perkawinan dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga tidak dapat melakukan tawar-menawar dalam bidang hukum peribadatan ini. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa harus diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam<sup>11</sup>.

Sebagai contoh di bidang hukum perburuhan, tentunya harus ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh yang beragama Islam untuk menunaikan salat Jum'at misalnya. Begitu juga di bidang haji, zakat dan perkawinan, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat, perkawinan dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir oleh Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka<sup>12</sup>.

Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralisme hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan

---

11 Muwahid, *Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 5.

12 Yusril Ihza Mahendra, *op. cit.*, hlm. 5.

prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam diakui secara langsung keberlakuannya oleh undang-undang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya.”<sup>13</sup>

Di sini bermakna, bahwa keabsahan perkawinan bagi seorang muslim atau muslimah adalah jika dilakukan menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada *Compendium Frijer*, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walaupun dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden (Inpres No. 1 Tahun 1991).

Pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil transformasi kaidah-kaidah hukum Islam, misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji yang mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum positif. Berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis juga telah memberikan tempat yang sewajarnya bagi kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi, misalnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

---

13 Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Asuransi Syariah, dan lain-lain. Di bidang peradilan Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana ada penambahan kompetensi Peradilan Agama untuk mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

### **3. Akibat Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dirasakan sangat ideal. Karena perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tetapi terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa<sup>14</sup>.

Meskipun, sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan berbeda agama karena mereka akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat.

---

14 Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 21.

Dalam agama Islam perempuan yang beragama Islam dilarang kawin dengan laki-laki non Islam. Karena agama Islam ini tidak menyuruh atau menganjurkan sesuatu itu jika tidak akan mendatangkan faedah yang diperoleh dari perbuatan itu. Juga tidak melarang untuk mengerjakan sesuatu kecuali karena mudharat. Agama Islam menentukan perintah dan larangan sebagai sarana untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan yang abadi itu, sebagai rambu-rambu lalu lintas bagi pemakai jalan raya yang dapat memberikan keamanan dalam perjalanan<sup>15</sup>.

Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam, *pertama* hukum Islam berdimensi *ilahiyyah*, yang diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Mahasuci, Mahasempurna, dan Maha-besar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci. Pengertian ini dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Dimensi, *kedua* adalah hukum Islam yang berdimensi *Insaniyyah*. Dimensi ini mengakomodasi upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang bernilai suci dengan melakukan dua pendekatan: yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasaid*. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan *ijtihad* atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istinbath al-ahkam*<sup>16</sup>.

---

15 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 55.

16 Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. vii.

Hukum Islam dalam dimensi kedua melahirkan berbagai istilah di antaranya, fikih, fatwa, dan *qadla*. Kemudian pada perkembangan berikutnya bermunculan berbagai macam nama untuk istilah ini. Istilah fikih, bagi orang awam seringkali disalahartikan dan memberi nama lain dengan hukum Islam atau syariat Islam. Hal ini terjadi karena paradigma yang terkandung dalam fikih adalah paradigma hukum, padahal sesungguhnya istilah-istilah tersebut sangat berbeda jika ditinjau dari terminologinya<sup>17</sup>.

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dilaksanakan berbagai bentuk: *Pertama*, implementasi melalui iman dan takwa; artinya bagi yang beragama Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian dan berasal dari agama Islam. Artinya, pelaksanaannya terbentuknya ibadah. Intensitasnya tergantung keimanan seseorang. Pelaksanaan melalui jalur ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2). *Kedua*, pelaksanaan dengan cara peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa telah ada regulasi yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam. Penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *Ketiga*, pelaksanaan hukum Islam melalui pilihan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hal seperti umat Islam Indonesia dapat melakukan transaksi di Bank Muamalat atau Asuransi Takaful karena lembaga-lembaga tersebut melakukan transaksi menurut hukum Islam. Dengan cara arbitrase yang telah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, para pengusaha

---

17 Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

atau industriawan atas kesepakatan bersama dapat menyelesaikan persengketaannya dengan menggunakan hukum Islam melalui perdamaian (di luar pengadilan). *Keempat*, pelaksanaan hukum Islam dengan cara penentuan produk makanan, kosmetik, dan minuman halal atau haram yang dikonsumsi umat Islam. Untuk itu dibentuklah lembaga pusat penelitian obat dan makanan (LPPOM) yang juga dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Keenam*, pelaksanaan dengan cara pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Artinya, norma atau asas hukum Islam dimasukkan ke dalam hukum nasional yang bukan hanya berlaku bagi umat Islam semata tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>18</sup>.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah<sup>19</sup>. Salah satunya perkawinan beda agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dinyatakan bahwa: “seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Berbeda agama ini dalam agama Islam, seorang muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim<sup>20</sup>.

18 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

19 Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 34.

20 Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 58.



Tampaknya berkenaan dengan larangan perkawinan yang ter-muat di dalam fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fikih, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI. Hal ini disebabkan karena masalah larangan perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*<sup>21</sup>.

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Alquran Al-Baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut:

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkah orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Kemudian berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke-II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 Perkawinan Antar Agama Umat Beragama, bahwa:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya.

---

21 Amiur Nuruddi, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 153.

- b. Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat.

Selanjutnya Quraiysh Shihab, dengan lantang mengatakan, perkawinan ini tidak sah, baik menurut agama maupun menurut negara. Pendapat ini di kuatkan oleh Muardi Khatib, salah seorang tokoh majelis tarjih Muhammadiyah yang berpendapat bahwa persoalan ini jelas di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 221, di sana dijelaskan secara tegas bahwa seorang wanita Muslim Haram hukumnya menikah dengan laki-laki non Muslim dan sebaliknya laki-laki Muslim haram menikahi wanita non Muslim, “ini sudah menjadi konsensus ulama,” tambahnya, “Konsekuensinya perkawinan ini harus dibatalkan”. Pendapat senada juga disampaikan K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut madzhab Syafi’I, setelah turunnya Alquran orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab<sup>22</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur di dalam Pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam<sup>23</sup>”.

---

22 Abd. Rozak A. Sastra, *op. cit.* hlm. 63–64.

23 M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 7.

Larangan untuk wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI yaitu: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Namun dalam praktiknya pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. Alasan pihak laki-laki bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menghukum umatnya yang berkehendak baik dan berbuat baik<sup>24</sup>.

Dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19–22 Jumadil Akhir 1426H/26–29 Juli 2005M, menetapkan:

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaul muatamad, adalah haram dan tidak sah.

Sedangkan kalau suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri;
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

#### **4. Akibat Hukum bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Sebelumnya, Hukum Perkawinan yang berlaku pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Agustus 1945, secara umum dibagi

---

24 Mudiarti Trisnarningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2007, hlm. 58.

ke dalam lima kategori. Kelima kategori tersebut merupakan sistem hukum yang secara sengaja diciptakan guna memfasilitasi keragaman perkawinan. Kelima sistem tersebut adalah:

- a. Hukum perkawinan bagi golongan Eropa dan orang-orang yang dilaksanakan dengan mereka, dan golongan Timur Asing keturunan Cina.
- b. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi dan golongan Timur Asing pemeluk agama Islam.
- c. Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen.
- d. Hukum perkawinan bagi golongan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran.
- e. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi pemeluk agama Kristen berlaku sejak 1933<sup>25</sup>.

Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 Nomor 158<sup>26</sup>.

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

25 *Ibid*, hlm. 4.

26 Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm, 68.

Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama<sup>27</sup>.

Hal yang signifikan di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara, bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya<sup>28</sup>.

Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam praktiknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama, yaitu sebagai berikut.

27 Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11.

28 Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, Jakarta, 2005, hlm. 7.

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut<sup>29</sup>.

Sedangkan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama sudah dijelaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

29 Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Insani, Jakarta, 2005, hlm. 11.

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang berbunyi:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian mengenai hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan, menurut agama

Islam hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 7-12, 13 dan 176; di samping itu juga berdasarkan pada pendapat dalam Alquran dan Hadis. Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal<sup>30</sup>.

Anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak saudara tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak-anak<sup>31</sup>.

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat Islam yaitu:

- a. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal;
- b. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum;
- c. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu;

---

30 Purwanto, *Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama*, Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 20.

31 R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983, hlm. 33.



1. Hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan;
2. Hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau istri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt;
3. Hubungan perbudakan; dan
4. Karena hubungan agama Islam<sup>32</sup>.

Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan.

Karena perkawinan campuran beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak mengikuti aturan hukum agama yang berlaku, maka anak yang lahir akibat perkawinan beda agama ini disamakan dengan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Namun anak di luar kawin tetap bisa mendapatkan warisan apabila anak tersebut diakui oleh bapaknya.

Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya.

---

32 Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Jika dalam perkawinan itu lahir anak-anak, mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab X dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dalam praktik, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami istri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
4. Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya. Kecuali kalau untuk kepentingan anak itu menghendaki;
5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk jangka

waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang<sup>33</sup>.

## **B. Dampak Negatif bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

### **1. Hukum Pernikahan Beda Agama**

Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan itu ada dua macam: karena hubungan nasab dan karena sebab (yang lain)<sup>34</sup>.

Dalam Islam, menikah dengan orang ahli kitab itu diperkenankan. Namun menikah dengan orang musyrik dalam bentuk apa pun sama sekali dilarang, baik orang yang menyembah berhala, orang yang keluar dari Islam (murtad), penyembah sapi atau binatang lain, menyembah pepohonan atau penyembah batu<sup>35</sup>. Faktor yang mendorong jumhur fuqaha membolehkan mengawini wanita-wanita merdeka ahli kitab dengan akad nikah, karena pada dasarnya ketentuan khusus itu harus ditegakkan di atas ketentuan umum<sup>36</sup>.

33 Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 45.

34 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2006, hlm. 326.

35 A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 175.

36 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, buku 2, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 495.

Ketentuan tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5, sedangkan ketentuan umum ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Kedua ayat di atas, menegaskan bahwa seorang muslimah tidak boleh dinikahi oleh lelaki musyrik. Dan karena tidak terdapat dalil yang mengecualikan lelaki ahlulkitab dari larangan itu, maka seorang muslimah pun tidak boleh dinikahi oleh lelaki ahlulkitab<sup>37</sup>. Karena perkawinan orang mukmin dengan orang musyrik itu akan menyesatkan pihak orang muslim karena akan membawa kepada jalan kemusyrikan. Ikatan suami dan istri bukan hanya hubungan seksual semata, melainkan hubungan batin dan budaya. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dilarang di dalam Islam. Memang benar boleh jadi seorang muslim itu dapat mempengaruhi orang musyrik, agar keluarga dan keturunan orang musyrik itu berkenan memeluk agama Islam. Kemungkinan yang lain juga boleh jadi bahwa orang musyrik itu yang malah dapat menyeret pasangan yang muslim, bahkan keluarga dan keturunannya, menuju jalan kemusyrikan. Orang non muslim mungkin saja menyetujui akibat semacam ini, tetapi seorang muslim yang bertauhid tidak dapat melakukan perbuatan yang serupa. Orang-orang yang benar mukmin muslim, tidak akan pernah mengambil resiko hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya semata-mata. Orang mukmin muslim itu malah lebih suka mengendalikan hawa nafsunya ketimbang melakukan suatu perbuatan yang akan menyesatkan keimanannya, menjadikannya musyrik bagian atau paling tidak bagi keturunannya<sup>38</sup>.

37 Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 146.

38 Maududi Abdul A'la, *Tafsir Alquran*, (*The Meaning of The Quran*), vol. 1. Lahore, 1971, hlm. 154–155.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam atau tidak sesuai dengan aqidah Islam itu antara lain: 1) sahnya perkawinan yang tidak menurut hukum agama Islam, 2) anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, 3) larangan perkawinan karena adanya hubungan anak angkat atau bapak angkat, dan 4) perbedaan agama tidak merupakan penghalang perkawinan<sup>39</sup>.

Perkawinan beda agama, yang dalam praktiknya ternyata mengundang berbagai persoalan. Surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh calon istri untuk persyaratan perkawinan beda agama tidak mudah untuk mendapatkannya. Misalnya, bila seorang perempuan Islam hendak kawin dengan laki-laki non Islam, biasanya petugas pencatat nikah bagi orang Islam (penghulu) setempat sangat keberatan untuk mengeluarkan surat keterangan yang dibutuhkan oleh calon istri tersebut. Sebab bila petugas itu mengizinkan, dianggap ia telah memberikan izin perkawinan yang oleh agama Islam dilarang. Dalam hal demikian, biasanya akan berlanjut ke pengadilan, dan pada umumnya hakim pengadilan membenarkan calon mempelai tersebut melangsungkan perkawinan campuran. Namun perkawinan demikian seringkali menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan bahkan menimbulkan protes keras di kalangan umat Islam<sup>40</sup>.

Begitu juga yang prianya Islam dan perempuannya kristen, seringkali terjadi kesulitan untuk memperoleh surat keterangan

---

39 Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

40 *Ibid*, hlm. 81.

yang dibutuhkan oleh calon istri dari pemuka agamanya. Dalam hal demikian, biasanya perkawinan beda agama tersebut tetap dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam di hadapan penghulu. Sebab menurut hukum Islam, perkawinan antara pria muslim dengan perempuan ahli kitab tidak dilarang. Sebaliknya golongan agama kristen menganggap perkawinan antara seorang perempuan kristen dengan seorang pria Muslim dihadapan pegawai pencatat nikah bagi orang Islam (penghulu) sebagai pernikahan yang tidak sah<sup>41</sup>. Karena perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak hanya memiliki segi-segi perdata, juga merupakan perjanjian suci yang bisa lepas dari soal keimanan.

## **2. Dampak Perkawinan Beda Agama**

Dibidang hukum, perkawinan antar umat yang berbeda agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu antar golongan yang menurut Wirjono Prodjodikoro, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrokan antar berbagai hukum dengan tiada perbatasan<sup>42</sup>.

Kehidupan perkawinan yang dilakukan beda agama (Islam dengan non Islam), biasanya muncul permasalahan yang merupakan stresor psiokososial, antara lain:

- a. Dalam masyarakat perkawinan bukan semata-mata perkawinan antara dua individu, melainkan perkawinan antara dua keluarga, yaitu dengan melibatkan keluarga dua belah pihak.

---

41 T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977, hlm. 57.

42 R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, cetakan ke-7, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 93.

Bila pasangan berbeda agama, hal ini akan menyulitkan sikap masing-masing pihak keluarga. Demikian, pula salah satu pindah agama dan memakai tata cara salah satu agama, hal ini pun akan menimbulkan reaksi pada salah satu pihak keluarga dan doa restu keluarga sulit untuk diperoleh secara ikhlas.

- b. Sebagai kelanjutan dari butir 1 di atas, maka kemungkinan salah satu pasangan akan terkucil dari kelompok masyarakat agamanya atau keluarganya. Bila terjadi krisis perkawinan, maka akan sulit bagi pihak wanita untuk bisa diterima kembali di lingkungan keluarganya karena telah berpindah agama.
- c. Sering terjadi agar dapat menikah, dilakukan kompromi semu dengan jalan misalnya pada saat suami ikut/masuk agama istrinya, dan saat yang lain istri ikut agama suami dan kawin dengan tata cara agama suami. Dan sering juga dilanjutkan dicatatan sipil.
- d. Perkawinan antar agama mempunyai konsekuensi pada tumbuh kembang anak. Anak akan bingung ikut akidah agama yang mana. Salah satu stresor pada anak dan remaja adalah cara pendidikan yang berbeda antara ayah dan ibu.
- e. Perkawinan antar agama bisa menimbulkan konflik bidang hukum, soal perceraian, warisan, anak, dan sebagainya.
- f. Sering terjadi istri yang beragama Islam mengalami derita mental, manakala sang suami non Islam menghendaki campur, sedangkan ia sedang menjalankan puasa.
- g. Agama Islam tidak menghendaki orang Islam menikah dengan non muslim. Demikian pula halnya, dengan agama katolik maupun protestan.

- h. Sering kali suami Islam yang beristrikan non Islam mengalami kesulitan untuk kawin lagi atau bercerai, meskipun persyaratan hal tersebut secara Islam sudah terpenuhi.
- i. Bila salah satu pasangan meninggal, hendaknya dimakamkan secara agama yang mana. Tidak jarang terjadi pasangan Islam pada saat terakhir dari hayatnya “terbujuk” keluar dari agama Islam dan masuk agama suami/istrinya dan dimakamkan secara non Islam<sup>43</sup>.

Berdasarkan berbagai konsekuensi tersebut, tentunya sebelum melakukan perkawinan beda agama, penting artinya mempertimbangkan banyak hal, karena dapat berakibat antara lain:

- a. Adanya tekanan dari pihak keluarga, lembaga agama, dan adanya penyimpangan dari keadaan yang biasanya.
- b. Dapat terjadi tidak bersatunya interpretasi mengenai sesuatu, karena memang kerangka acuannya berbeda, sehingga hal ini kadang-kadang membawa kesulitan.
- c. Setelah pasangan itu mempunyai anak, keadaan ini akan lebih terasa, karena agama mana yang akan dididikan kepada anak menjadi persoalan. Dalam menentukan hal ini mungkin sekali menjadi pertentangan antara suami dan istri. Bila masing-masing pihak tetap bersitegang memegang pendapatnya sendiri-sendiri akan makin merumitkan keadaan. Keadaan itu akan bertambah rumit lagi kalau keluarga dari masing-masing pihak campur tangan dalam menentukan agama yang akan diberikan kepada anaknya<sup>44</sup>.

---

43 Hawari, dalam Website [www. Suaramuhibbuddin. Wordpress. com](http://www.Suaramuhibbuddin.wordpress.com) *Konseling Perkawinan Bab 3 tentang Hukum Perkawinan Antar Agama*, diakses Tanggal 30 April 2014.

44 *Ibid*,



Kemudian, selain akibat hukum perkawinan berbeda agama yang sudah dijelaskan pada bagian atas, kemudian ada lagi akibat hukum dari perkawinan beda agama, adalah:

- a. Sesuai dengan Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 kemudian diulangi tanggal 8 November 1986, maka perkawinan antar laki-laki Islam dengan wanita ahlulkitab “haram hukumnya”. Anak-anak hanya bernasab kepada ibunya saja, dan tidak kepada bapak. Demikian juga anak tidak mewarisi dari bapak.
- b. Bilamana pendapat kedua yaitu perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan wanita ahlulkitab (QS. Al-Maidah ayat 5) akibat hukumnya sama dengan perkawinan laki-laki Islam dengan wanita Islam yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Anak menjadi “anak sah” dan berhak mewarisi antara ayah dan anak. Demikian juga antara suami istri sebagai suami istri yang sah. Tetapi sebaliknya, jika wanitanya yang Islam, dan laki-laki ahlulkitab, maka perkawinan menjadi “tidak sah”.
- c. Jika dipenuhi persyaratan laki-laki itu harus taat, patuh dan bertaqwa kepada Allah benar-benar taqwa dan dapat membimbing istri dan anak-anaknya menjadi muslim dan muslimah, maka akibat hukum dari perkawinan beda agama itu “sah”, asal dipenuhi baik syarat maupun rukun-rukun perkawinan, seperti membayar mahar, ijab qabul, dan sebagainya<sup>45</sup>.

---

45 Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit*, hlm. 62.

### **3. Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama**

Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekannya bukan kepada siapa yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya<sup>46</sup>.

Tetapi ada kemungkinan pengesahan itu terbatas kepada:

- a. Jika setelah pengakuan, perkawinan yang direncanakan itu terhalang karena kematian salah satu pihak, hal ini merupakan pengecualian dari Pasal 214 N-BW, ada pengakuan tetapi tidak ada perkawinan;
- b. Jika pria yang sudah mengetahui kehamilan wanita itu dan bermaksud mengawininya tetapi meninggal sebelum kelahiran anak tidak sah itu tanpa mengakuinya. Dalam hal ini tidak ada pengakuan dan tidak ada perkawinan. Ketentuan pasal ini bertujuan untuk menawarkan pemecahan masalah karena kematian yang mendadak, sehingga menghalangi maksud pria

---

46 Erna Sofwan Syukrie, dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 84–83.

itu mengawini wanita hamil tersebut dan karena anak yang dikandungnya itu menjadi anak yang sah pada saat lahirnya<sup>47</sup>.

Sedangkan menurut Ahmad Husni syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu:

- a. Orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya;
- b. Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut<sup>48</sup>.

Begitu juga pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut hukum Islam sama dengan perbuatan zina maka anaknya yang dilahirkannya sama dengan anak hasil perbuatan zina, tidak diperkenankan untuk diakui oleh yang berbuat zina, kecuali ada dispensasi dari presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 283 jo 273 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini, maka anak zina tidak bisa dipaksakan pengakuan kepada laki-laki yang membuahnya. Hal ini didasarkan kepada asas hukum perdata yang menentukan bahwa dalam hukum perkawinan harus dihormati ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, di antaranya ada halangan bagi

---

47 Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Aditya Bakti, Bandung, 1988.

48 Ahmad Husni, *Ahkam Syar'iyah fi Ahwalisy Syashiyah Ala Mazahibil Imam Abu Hanifah*, Darul Qutub, Kairo, 1960, hlm. 56.

laki-laki untuk menikahi ibu si anak itu. Membenarkan pengakuan yang dipaksakan dalam peristiwa ini adalah bertentangan dengan prinsip KUH Perdata yang berlaku<sup>49</sup>.

#### **4. Dampak Negatif bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam**

Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan penganut agama yang berbeda, terutama terkait dengan status calon suami atau istri tersebut sebagai musyrik, ateis, atau ahlulkitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai Kitab dan mempercayai Muhammad SAW sebagai Rasul. Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadis, para ulama sangat menekankan agama (*al-din*) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan<sup>50</sup>.

Pernikahan dengan perempuan non Muslim diharamkan sampai ia beriman; mengawini para budak yang Islam lebih baik dari mereka. Firman Allah menjelaskan:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari wanita musyrik, kendati ia (yang musyrik) menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari orang musyrik, kendati ia (yang musyrik) menarik hatimu”.

---

49 Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 99.

50 Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 240–241.

Ulama berbeda pendapat tentang ahlulkitab. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa ahlulkitab tersebut tergolong musyrik, seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Asy Syafi'i mengatakan bahwa perempuan ahlulkitab yang halal dikawini oleh muslim adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang telah dianut oleh nenek moyang mereka sebelum kerasulan Muhammad SAW. Jadi pemeluk agama ini setelah turun Alquran tidak termasuk ahlulkitab lagi, karena kalimat: "perempuan-perempuan baik-baik dari orang yang menerima kitab sebelum kamu" (QS. Al-Maidah ayat 5), sebagai perempuan-perempuan yang halal dikawini. Jadi, ulama Syafi'iyah menghormati umat Nasrani dan Yahudi bukan karena agama, tetapi karena keturunan mereka. Oleh karena itu, perkawinan beda agama tetap diharamkan<sup>51</sup>.

Hazairin memberikan penafsiran atas Pasal 2 ayat (1) ini dengan mengatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Namun dalam satu komentarnya pula terhadap RUU Perkawinan sebelum disahkan, terutama tentang kebebasan menikah antar pemeluk agama dia menyatakan bahwa tidak ada kelonggaran bagi perempuan muslim Indonesia untuk dinikahi laki-laki non muslim, tetapi tidak sebaliknya. Artinya, menurut Hazairin, dengan merujuk kepada Alquran boleh hukumnya laki-laki muslim untuk menikahi perempuan yang non muslim<sup>52</sup>. Sementara Lopian M. Ghandi melihat dari apa yang tersirat dalam Pasal 2 beserta penjelasannya, karena adanya pluralisme kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai

51 Yaswiran, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 211.

52 Hazairin, dalam Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 164.

sahnya perkawinan, masih diakui tetapi berlaku. Hal inilah yang menjadikan negara masih tetap memberi ruang atas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat, agama, dan kepercayaan<sup>53</sup>.

Ahmad Tholabi Kharlie memberikan pendapatnya tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan sendiri memberikan pandangan netral terhadap masyarakat. Seolah-olah undang-undang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pasangan sendiri dan tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Hal ini justru menjadikan hukum keluarga efektif dan seiring dengan kepentingan masyarakat, yang mayoritas tidak sepakat dengan perkawinan beda agama<sup>54</sup>.

Sehubungan dengan hal di atas, Direktur Pembinaan Peradilan Agama Depag RI (saat ini Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI) pernah meminta kepada Kantor Catatan Sipil untuk tidak mencatatkan perkawinan antar umat Islam dengan pemeluk agama lain<sup>55</sup>.

Secara psikologis anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama pasti mempunyai dampak negatif, karena setelah anak tersebut dewasa disuruh memilih agama yang ia anut baik itu agama dari bapaknya maupun agama dari ibunya. Hal ini membuat psikologi anak terganggu baik menanggung rasa malu di dalam pergaulannya di dalam masyarakat maupun pergaulan dengan teman-teman sebayanya.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya,

---

53 Lopian M Ghandi, dalam Athao Mudzhar dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, tanpa tahun, hlm. 70.

54 Ahmad Tholabi Kharlie, *op. cit.*, hlm. 245.

55 Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hlm. 9.

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah<sup>56</sup>.

Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahirannya. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan<sup>57</sup>.

Dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif hukum Islam, yaitu dianggap sebagai anak yang tidak sah, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, tetapi hanya mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya. Karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah, kalau hal ini masih terjadinya maka hukumnya dianggap zina, berkenaan dengan status anak yang dilahirkan merupakan anak zina yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, baik menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun penjelasan fikih.

---

56 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 276.

57 Lihat Majalah Bulan No. 472/xxxix/2012, *Perkawinan & Keluarga, Problematika Anak di Luar Nikah*, 2012, hlm. 10.

Meskipun anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama merupakan anak yang tidak sah, karena perkawinan kedua orang tuanya merupakan perkawinan yang tidak sah baik menurut Al-quran maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM Internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak<sup>58</sup>.

Perlindungan anak semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara juridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya<sup>59</sup>. Sejalan dengan itu Shanti Dellyana mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya<sup>60</sup>.

Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni: 1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*); 2) hak terhadap perlindungan (*protection rights*); 3) hak untuk tumbuh kembang (*development rights*); dan 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)<sup>61</sup>.

58 Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 225.

59 Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, YLBHI bekerjasama dengan RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 22.

60 Shanti Dellyana, *op. cit.*, hlm. 18–19.

61 Lihat *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi yang terdiri dari tiga bagian dan 54 Pasal ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Nomor 44/25 Tanggal 10 November 1989 dan secara efektif berlaku sejak 2 September 1990.



Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu. Dus, menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah-langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak (*the best interest of the child shall be primary consideration*)<sup>62</sup>.

## **5. Dampak Negatif bagi Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

### **a. Peran Anak dalam Keluarga dan Bangsa**

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak-anak saat ini. Akan tetapi, hal itu tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dengan pemenuhan haknya. Hak-hak yang dimaksud, secara mendasar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi<sup>63</sup>.

Anak sebagai penerus keluarga dan cikal bakal menjadi pimpinan dalam masyarakat dan negara, sejak dilahirkan harus memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga tidak menjadi hambatan kultural, sosial, politik, dan hukum bagi perkembangannya di masa mendatang. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang

---

62 Philip Alston, *The Best Interest of the Child Reconciling Culture and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 1994.

63 Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 227.

dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjingan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zinah, dan sebagainya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut<sup>64</sup>.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah SWT. Anak adalah tempat orang tua men-curahkan kasih sayangnya. Dan anak juga penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang<sup>65</sup>.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang ke-abadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak)

---

64 Tan Kamello,dkk, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 67.

65 Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 172.

yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah<sup>66</sup>.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara<sup>67</sup>.

#### **b. Dampak Negatif bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan yang berbeda agama (pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam atau sebaliknya) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan larangan terhadap orang Islam mengawini orang yang tidak beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>68</sup>.

66 Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional", melalui [www.google.com](http://www.google.com), diakses pada tanggal 30 April 2014.

67 Muladi, *op. cit.*, hlm. 231–233.

68 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 98.

Mengenai dampak negatif terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, baik menurut hukum perdata, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka berdampak terhadap anaknya, karenanya tidak mempunyai hubungan keperdataan terhadap bapaknya. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah begitu juga terhadap status anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama merupakan anak yang tidak sah. Anak yang sah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama atau anak yang lahir di luar nikah. Di sini penulis menyamakan anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dengan anak yang lahir di luar nikah. Karena perkawinan beda agama ini merupakan perkawinan tidak sah, jadi penulis menganggap tidak ada status pernikahan terhadap orang yang menikah beda agama. Dan anaknya tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap bapaknya.

Meskipun baru-baru ini ada putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) terhadap permohonan yang diajukan pada tanggal 17 Februari 2012, MK mengabulkan sebagian permohonan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini digugat dua warga Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Banten, yaitu Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. MK memutuskan bahwa

anak yang lahir di luar pernikahan bukan anak haram dan berhak mendapatkan akte kelahiran dari negara.

Dalam putusan MK menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

MK memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tak hanya berhubungan secara perdata kepada ibunya, tetapi juga laki-laki yang terbukti sebagai ayahnya. Istisyyaroh memahami bahwa putusan itu untuk mencegah laki-laki mudah berselingkuh dengan perempuan lain. Tapi dia khawatir ketika anak di luar nikah dinyatakan memiliki hak yang sama dengan anak sah itu mendorong perempuan menganggap enteng pernikahan<sup>69</sup>.

Menurut Maria Farida, meskipun hukum negara maupun hukum agama tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan dosa turunan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Artinya, kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang itu semesti risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan kata lain potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tersebut merupakan risiko bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan tidak harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

---

69 Majalah Bulanan, *op. cit*, hlm. 4.

Jadi, hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan terlepas dari sah atau tidak perkawinan tersebut tetap harus terpenuhi<sup>70</sup>.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri;
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Tentang akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami istri diatur dalam Bab VII yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu: Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Secara umum perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 7.

antara suami istri. Hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya", sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum<sup>71</sup>.

Karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak mengikuti aturan hukum agama yang berlaku, maka anak yang lahir akibat perkawinan beda agama ini disamakan dengan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Namun anak diluar kawin tetap bisa mendapatkan warisan apabila anak tersebut diakui oleh bapaknya.

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat islam yaitu:

1. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal;
2. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum;
3. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu;
  - a. Hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan;

---

71 Anggreini Carolina Palandi, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 11.

- b. Hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau istri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt;
- c. Hubungan perbudakan; dan
- d. Karena hubungan agama Islam<sup>72</sup>.

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Selain akibat hukum di atas, dalam perkawinan beda agama akan mengakibatkan dalam pemeliharaan dan pendidikan anaknya, khususnya pendidikan agama anaknya. Perebutan antara suami dan istri memberikan efek pendidikan yang buruk terhadap anaknya. Ketika salah satu orang tua memberikan pilihan masing-masing agama, maka anak merasa bingung dan kehilangan kebebasannya untuk menentukan pilihan agamanya<sup>73</sup>. Hal itu akan mempengaruhi dalam pertumbuhan pribadi anak, karena berlainan pendidikan yang diberikan. Sikap orang tua yang berbeda akan menyebabkan si anak terombang ambing diantara dua kekuatan yang berpengaruh.

Hal tersebut dapat dilihat dari pernikahan yang dilakukan oleh Adrie Subono yang beragama Islam menikah dengan Chrisye

<sup>72</sup> Amin Husein Nasution, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>73</sup> Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqh dan KHI*, Qalibun Salim, Jakarta, 2005, hlm. 167.



yang beragama Kristen. Dalam keluarga dengan tiga orang anak itu, Adrie menerapkan prinsip demokrasi. Ia membebaskan anak-anaknya untuk memilih sendiri agama mereka. Anak-anak mereka memilih agamanya masing-masing, dan kebetulan sesuai dengan jenis kelamin orangtua. Dua putrinya ikut agama ibu, dan putranya masuk Islam bersama Adrie.

Kemudian perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Jeremy Thomas yang beragama Kristen, menikah dengan Ina Indayanti yang beragama Islam. Mereka menikah dengan masih menganut agama masing-masing. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Axel Matthew Thomas dan Valerie Teresa Thomas. Dan banyak lagi pasangan perkawinan beda agama ini, terutama dilakukan oleh selebriti di Indonesia.

Perkawinan beda agama ini, seperti perkawinan yang dilakukan oleh selebriti di atas, dapat menimbulkan beberapa aspek dampak negatif terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama, yaitu:

#### 1. Aspek Psikologis

Problem yang muncul pasangan suami istri dari perkawinan beda agama, yang dapat berimbas kepada anak-anak mereka, antara lain:

- a. Memudarnya kehidupan rumah tangga;
- b. Tujuan berumah tangga tidak tercapai, karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Perkawinan mempertemukan dua keluarga besar, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami istri, melainkan juga

- keluarga besarnya. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama telah memiliki anak;
- d. Berebut pengaruh, dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anak-anaknya.

## 2. Aspek Religius

Pandangan agama Islam, terhadap perkawinan antaragama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya;

- a. Pandangan agama Katolik, salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama;
- b. Pandangan agama Protestan, pada prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman;
- c. Pandangan agama Hindu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antaragama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu;
- d. Pandangan agama Buddha, perkawinan antaragama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Buddha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Buddha;

3. Aspek Yuridis, hukum perkawinan beda agama di negara Republik Indonesia tidak sah. Baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>74</sup>.

Dalam kasus perkawinan beda agama ada pendapat yang menyatakan, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya<sup>75</sup>. Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakannya maka anaknya dapat mewarisi harta ayahnya, merupakan pendapat yang salah dan menyesatkan masyarakat.

Meskipun masalah perkawinan campuran/beda agama ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini. Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama, yaitu:

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan;

---

74 Abd. Rozak A. Sastra, *op. cit*, hlm. 54–83.

75 *Ibid*, hlm. 12.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Jarwo Yunu, *op. cit*, hlm. 11.

# ***Bab IV***

## **Penutup**

### **A. Simpulan**

1. Akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyangkut 3 (tiga) hal penting, yaitu: tidak timbulnya hubungan antara suami istri karena perkawinan yang tidak sah, anak tidak bisa mewarisi harta benda dari ayahnya, kemudian tidak ada hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua (ayah) hanya mempunyai hubungan keperdataan terhadap ibunya dan keluarganya ibunya.
2. Dampak negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama perspektif menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berdampak pada psikologis anak karena anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama akan bingung untuk memeluk agama ayah atau ibunya, kemudian dampak hukumnya baik hukum

Islam maupun hukum negara Indonesia karena kedua hukum ini tidak ada yang mengesahkan perkawinan beda agama begitu juga anak yang dilahirkan merupakan anak yang tidak sah.

## **B. Saran**

### **1. Ditujukan Kepada Legislator (Pembuat Undang-Undang):**

Legislator, baik Pemerintah maupun DPR harus merevisi semua peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya dengan perkawinan di Indonesia karena perkawinan beda agama semakin marak terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan masih lemahnya hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, sehingga dengan direvisinya undang-undang dibidang perkawinan ini maka kedepannya tidak ada lagi orang yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

### **2. Ditujukan Kepada Pejabat Kemenag RI:**

Pejabat Kemenag RI harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat Kantor Urusan Agama atau penghulunya yang menikahkan warga negara Indonesia yang berbeda agama. Karena Kantor Urusan Agama atau penghuluh merupakan ujung tombak yang melakukan atau meresmikan perkawinan tersebut.

# Daftar Pustaka

## A. Buku-Buku

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

Abidin, Slamet dan H. Amibuddin, *Fiqh Munakhat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978.

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

———, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Alston, Philip, *The Best Interest of the Child Reconciling Culture and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 1994.

- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- A'la, Maududi Abdul, *Tafsir al-Quran, (The Meaning of The Quran)*, vol. 1. Lahore, 1971.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008.
- Atmasasmita, Romli (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, Jakarta, 2005.
- Darajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Depag RI, Jakarta, 1985.
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Dimiyati, Kuzaifah, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945–1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Djalil, Basiq, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqh dan KHI*, Qalibun Salim, Jakarta, 2005.
- Doi, Abdul Rahman I., *Perkawinan dalam syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- , *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Beginselen en stelsel Van Het Adatrecht)*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.



- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- al-Hamidy dan Hmd Ali, *Islam dan Perkawinan*, Al Maarif, Bandung, 1983.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- Hartono, Soenaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1991.
- Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975.
- Husni, Ahmad, *Ahkam Syar'iyah fi Ahwalisy Syashiyyah Ala Mazahibil Imam Abu Hanifah*, Darul Qutub, Kairo, 1960.
- Ibrahim, Jonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- aj-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Jafizham, T, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008.
- Kamello, Tan dkk, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2011.

- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, t t.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kusumah, Mulyana W., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, YLBHI bekerja sama dengan RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1986.
- Mahfud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Martosedono, Amir, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mubarrok, Jaihi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- , Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1994.
- Mudzhar, Athao dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia*, t t.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2006.

- MZ, Labib dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006.
- Muwahid, *Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, t t.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Dina utama, Semarang, 1993.
- Nurfuadi, *Urgensi Keluarga dalam Mendidik Anak*, dalam Jurnal Studi Gender & Anak Yin Yang Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Volume 4, Nomor 1 Januari-Juni 2009.
- Nuruddi, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Antar Golongan Di Indonesia*, cetakan ke-7, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.
- , *Hukum Waris di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983.
- , *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, tanpa tahun.
- Purwanto, *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- , *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011.
- Riyoatmojo, Suharto, *Atropologi Budaya*, UP. Prapanca, Yogyakarta, 1980.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, buku 2, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, t t.
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sastra, Abd. Rozak A., *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2011.

- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- ash-Shiddiqy, Tengku M Hasbi, *Al Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1987.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan xi, Sinar Grafika Jakarta, 1987.
- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- as-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Sutedjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Supriadi, Wila Chandrawita, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia, Jakarta, 1997.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990.

- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Usu Asy-Syariah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz I, 2005.
- Syukrie, Erna Sofwan, dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Timahi dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Trisnaningsih, Mudiarti, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Indonesia*, Utomo, Bandung, 2007.
- Usman, Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Yaswiran, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Yunu, Jarwo, *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Insani, Jakarta, 2005.
- Zahid, Moh, *Dua Puluh Lima Tahun, Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Depertemen Agama R.I, Jakarta, 2002.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Gunung Agung, Jakarta, 1987.

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## **B. Jurnal dan Makalah**

Mahendra, Yusril Ihza, "*Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Desember 2007.

Palandi, Anggreini Carolina, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.

## **C. Undang-Undang**

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **D. Website**

Hawari, dalam Website [www. Suaramuhibbuddin. Wordpress. com](http://www.Suaramuhibbuddin.wordpress.com) *Konseling Perkawinan Bab 3 tentang Hukum Perkawinan Antar Agama*, diakses tanggal 30 April 2014.

[www.google.com](http://www.google.com), diakses pada tanggal 30 April 2014.

<http://www.lihat.co.id/2013/03/10-pasangan-selebritis-ini-bahagia.html>, diakses tanggal 2 Juni 2014.

# *Riwayat Hidup Penulis*



Putera Sriwijaya ini memiliki nama lengkap yaitu Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M. Hum, Penulis sekarang berdomisili di Jln. Sapta Marga Lrg. Pancasila No. 61 Rt. 51 Palembang. Sehari-hari beraktivitas sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang. Selain dari itu menyempatkan diri sebagai dosen Luar Biasa (LB) di Kota Palembang Negeri

maupun swasta, antara lain: di PPS IAIN Raden Fatah Palembang, PPS UNSRI pada Program Ilmu Hukum, Universitas Taman Siswa pada Megister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah pada Program Megister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang, STIA Satya Negara, dan STIE Musi Palembang.

Ketua Program studi HTN PPS IAIN Raden Fatah Palembang ini mengenyam pendidikan terakhirnya di S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, diselesaikan pada tahun 2013 dengan dosen-dosen yang kualitasnya tidak perlu



dipertanyakan misalnya: Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. (yang bergelar Begawan Hukum), Prof. Dr. Muladi, S.H. (mantan Menkeh era Soeharto), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (pelopor pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), dengan disertasi mengangkat masalah Legislasi Perundang-undangan. Dalam kesibukan tugasnya dalam dunia pendidikan tinggi penulis yang juga sebagai Asesor BAN-PT ini, sering juga dipercaya sebagai nara sumber pada acara seminar, penyuluhan, pelatihan dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.

Penulis pernah menulis berbagai buku, jurnal dan media massa. Karya tulis yang telah diterbitkan berupa buku, antara lain: *Patologi Sosial Ditinjau dari Sosiologis, Yuridis, dan Filosofis*. Sedangkan karya tulis yang dimuat dalam jurnal, antara lain: *Transformation: Historial Analysis Towards Egalitarian Characters, Aspek Hukum dan Teknologi, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral*. Penulis di samping sibuk menulis juga menyempatkan diri dalam berorganisasi, baik organisasi sosial keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan, antara lain: Sekretaris BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Palembang, Ketua Bidang Advokasi Hukum BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Prov. Sumatera, Anggota DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia) PGRI Kota Palembang, Ketua Bidang Pembinaan Umat BAMUKOI (Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir) Pusat.